**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
**DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**
**UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V**
Jalan Imam Bonjol No. 135 Kode Pos 27511 Sijunjung

# LAPORAN TAHUNAN 2023

**PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN**

**UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena atas Rahmat-Nya Dokumen **Laporan Tahunan 2023** UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Tahunan 2023 merupakan laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V kepada Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggung jawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Tahunan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V adalah salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi dan tupoksi yang diembannya kepada public, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintah Serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. sebagai salah satu perwujudan atas pelaporan pelaksanaan APBD Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Secara umum disadari bahwa pemeliharaan rutin jaringan jalan provinsi merupakan bagian penting dari kegiatan pembinaan jalan, dalam arti penting tersebut dilatar belakangi kenyataan bahwa sebaik-baiknya jalan yang telah dibangun, apabila tanpa pemeliharaan yang memadai tidak akan dapat memenuhi fungsi dan mencapai nilai manfaat optimal seperti yang diharapkan selama umur rencana, meningkatkan hasil guna dan berdaya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Demikianlah Laporan Tahunan ini dibuat dan menjadi pedoman, sekaligus sebagai alat pemacu untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, oleh sebab itu saran yang membangun akan selalu kami harapkan untuk perbaikan pada masa mendatang.

Sijunjung, 29 Desember 2023
Kepala UPTD Jalan & Jembatan Wilayah V
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

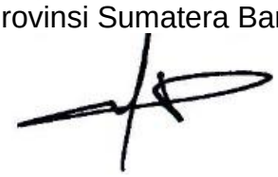

**MITRA HENGKY, ST**
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19820718 200604 1 003

# EXECUTIVE SUMMARY

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan pada ruas jalan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok serta Kabupaten Dharmasraya. Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelakasana Teknis Daerah.

Provinsi Sumatera Barat memiliki Visi Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan Berkelanjutan, yang dijabarkan menjadi 7 misi. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berkontribusi untuk mendukung Misi 6, meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tahun 2023, Sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki 1 program, 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan.

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 5.496.984.552,- dengan Realisasi anggaran pada 31 Desember sebesar Rp. 5.494.155.636,- (99,95%).

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
EXECUTIVE SUMMARY ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR GAMBAR ..... vi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Kedudukan ..... 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi ..... 1
1.3. Isu Strategis Pemeliharaan Jalan ..... 2
1.4. Strategi dan Kebijakan ..... 2
1.5. Program dan Kegiatan ..... 3
BAB II GAMBARAN UMUM ..... 4
2.1. Kelembagaan ..... 4
2.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan ..... 6
2.3. Tugas dan Fungsi ..... 7
2.3.1. Kepala UPTD Jalan dan Jembatan ..... 7
2.3.2. Sub Bagian Tata Usaha ..... 8
2.3.3. Seksi Jalan dan Jembatan ..... 8
2.3.4. Wilayah Kerja ..... 9
2.3.5. Tata Kerja ..... 9
2.4. Sumber Daya Manusia (SDM) ..... 9
2.4.1. Rekapitulasi PNS ..... 9
2.4.2. Rekapitulasi Non PNS ..... 10
2.5. Peralatan ..... 11
2.5.1. Peralatan Kantor ..... 11
2.5.2. Peralatan Lapangan ..... 11
BAB III KINERJA ..... 13
3.1 Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Paket Pekerjaan ..... 13
3.1.1. Pelaksanaan Program ..... 13
3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan ..... 13
3.1.3. Pelaksanaan Kegiatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari pelaksanaan program yang dijabarkan sebagai berikut : ..... 13
3.1.4. Pelaksanaan Sub Kegiatan ..... 14
3.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah ..... 14
3.2.1. Permasalahan ..... 14

3.2.2. Upaya Pemecahan Masalah .....15
3.3. Realisasi Fisik dan Keuangan .....15
3.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor .....16
3.3.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD .16
3.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik .....16
3.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor .....17
3.3.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan.. **Error! Bookmark not defined.**
3.3.6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan .....17
3.3.7. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan .....17
3.4. Capaian Kinerja.....18
3.5. Pelaksanaan Kegiatan .....18
3.6. Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD **Error! Bookmark not defined.**
3.7. Paket yang Melewati Tahun Anggaran 2023 dan Paket putus kontrak .....19
3.7.1. Paket yang Melewati Tahun Anggaran 2023 .....19
3.7.2. Paket Paket putus kontrak .....19
3.8. Penghargaan.....21
BAB VI PENUTUP.....22
LAMPIRAN .....23

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Strategi Pemeliharaan Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V.....3
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....9
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Seksi V.1 .....10
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Seksi V.2 .....10
Tabel 2.4 Rekapitulasi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wil. V Non PNS .....11
Tabel 2.5 Peralatan Penunjang Kegiatan di Kantor.....11
Tabel 2.6 Peralatan Penunjang Kegiatan di Lapangan .....11
Tabel 3.1 Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin Jalan.....14
Tabel 3.2 Capaian Kinerja.....18
Tabel 3.3 Pelaksanaan Kegiatan.....18

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Tahun 2023 ..... 24
Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V..... 26

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Kedudukan

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas BMCKTR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas BMCKTR sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur dengan Nomor 50 Tahun 2020 sebelumnya yang bernama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruangdengan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan bagian dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal Tarkim). Setelah Perda Nomor 8 tahun 2016 diterbitkan maka Dinas Prasjal Tarkim dipecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

Dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 68 Tahun 2018 sebanyak 6 (enam) wilayah kerja dengan tujuan melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

## 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaran pelaksanaan penyusunan program kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.

b. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen – dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
e. Pemberian bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 1.3. Isu Strategis Pemeliharaan Jalan

Pembangunan Sumatera Barat telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani segera melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan. Di bidang infrastruktur, Sumatera Barat menghadapi tantangan untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah salah satu OPD yang terlibat langsung dalam permasalahan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat.

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 program, 2 kegiatan dan 6 subkegiatan. Pada tahun 2023 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 177.88 Km dari total Jalan yang menjadi kewenangan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 620-357-2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Sedangkan untuk pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jembatan pada Tahun Anggaran 2023, UPTD Jalan dan Jembatan melakukan pemeliharaan sepanjang 860,5 M Jembatan yang terdapat pada ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan.

### 1.4. Strategi dan Kebijakan

Untuk menyadari permasalahan kondisi jalan dan jembatan di wilayah kerja UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, strategi umum yang ditempuh yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Tabel 1. 1 Strategi Pemeliharaan Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI**

| Strategi | Fokus |
|---|---|
| 1. Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan | a. Pemeliharaan Rutin Jalan<br>b. Pemeliharaan Rutin Jembatan |

## 1.5. Program dan Kegiatan

Untuk mengaplikasikan strategi dan fokus pembangunan dituangkan kedalam program sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Rutin Jalan
b. Pemeliharaan Rutin Jembatan

Selain itu ada beberapa program yang mendukung strategi diatas, yaitu :

a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

# BAB II
# GAMBARAN UMUM

## 2.1. Kelembagaan

Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan, serta pengamanan bagian-bagian jalan dan jembatan dengan ruas penanganan jalan dan jembatan.

Uraian tugas Seksi Jalan dan Jembatan meliputi :

a. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;
b. Menyelenggarakan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan;
c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;
d. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan Kabupaten/Kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;
e. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan/pemantauan harian kondisi jalan dan jembatan serta membuat laporan harian kondisi jalan dan jembatan;
f. Menyelenggarakan pembuatan desain teknis sederhana (simplified sesign) untuk pengamanan bagian badan jalan dan/atau daerah milik jalan;
g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada bagian jalan dan daerah milik jalan;
h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan pemulihan kondisi jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur Organisasi Seksi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

# STRUKTUR ORGANISASI

## UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V

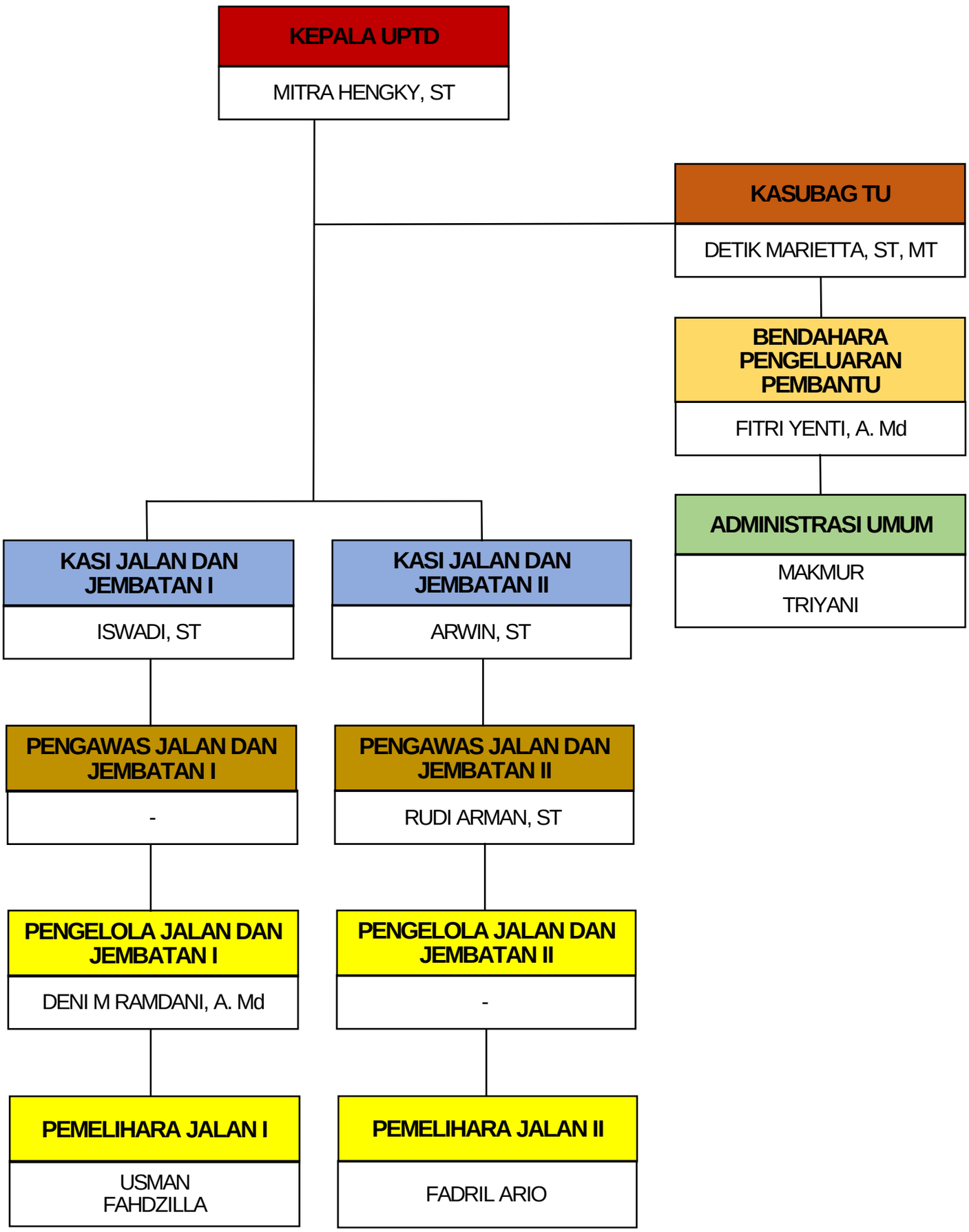

## 2.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menangani jalan Provinsi sepanjang 177,88 Km yang tersebar di wilayah Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, dan Kab. Dharmasraya. Infrastruktur jalan mempunyai peranan yang strategis dan penting dalam pembangunan, untuk itu harus dikelola dengan baik agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Sesuai dengan karakteristiknya, infrastruktur jalan selalu cenderung mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya kerusakan. Maka untuk memperlambat kecepatan penurunan kondisi jalan dan mempertahankan kondisi pada tingkat yang layak/mantap, infrastruktur jalan tersebut perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar dapat berfungsi sepanjang waktu. Pengelolaan pemeliharaan jalan bukanlah pekerjaan yang mudah, lebih-lebih pada saat kondisi anggaran yang terbatas serta beban kendaraan yang cenderung jauh melampaui batas dapat mempercepat kerusakan jalan. Disamping itu kesadaran masyarakat agak berkurang dalam hal pemeliharaan jalan.

Seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah di Indonesia, tanggung jawab administratif dalam pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan beralih ke pemerintah daerah. Peralihan tanggung jawab tersebut sudah sewajarnya harus dapat diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal anggaran untuk pemeliharaan jalan.

Untuk mempertahankan kondisi jalan mantap diperlukan pemeliharaan secara rutin, sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Bertitik tolak dari kondisi mantap tersebut, pemeliharaan jalan sangat perlu dilakukan secara terus menerus/rutin dan berkesinambungan. Pemeliharaan Jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namaun mencakup pula pemeliharan bangunan, pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana – sarana pendukung lainnya.

Pola pemeliharaan jalan yang dilakukan saat ini dilakukan dengan cara Pemeliharaan secara rutin. Pemeliharaan rutin dilakukan secara terus – menerus sepanjang tahun pada kondisi jalan mantap. Pemeliharaan rutin merupakan pekerjan sederhana dan setempat serta tidak dilakukan untuk meningkatkan kekuatan struktur. Dalam pelaksanaannya pemeliharan jalan memerlukan biaya yang cukup serta kepedulian masyarakat pengguna jalan.

Pemeliharaan rutin jalan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi

jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas selama rencana jalan yang ditetapkan.

Pemeliharaan jalan, terutama pekerjaan rutin seperti pembersihan saluran, pemotongan rumput dan penambalan lubang, tidak dilakukan sesuai standar dan dengan biaya yang minim. Kurangnya intensitas pemeliharaan jalan akan menyebabkan jalan cepat rusak dan mempersingkat umur ekonomis dari layanan jalan tersebut.

Dampak berlanjut terhadap pemeliharaan yang tidak memenuhi standar, akan mengakibatkan percepatan pelaksanaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Dengan demikian penanganan kegiatan Jalan hanya berkisar pada siklus rekonstruksi – kerusakan – rehabilitasi yang akan memakan biaya yang mahal dibandingkan dengan pemeliharaan jalan yang tepat waktu, mutu dan biaya.

Hal ini ditambah dengan kenyataan adanya kecenderungan para pembuat kebijakan untuk mengutamakan pembangunan jalan baru dan rekonstruksi dibandingkan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan yang telah ada. Pemerintah menyadari permasalahan tersebut dan mengambil langkah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan jalan. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai institusi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab terhadap Jalan Nasional dan bertugas melakukan pembinaan teknis, ditugaskan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Pusat atas jalan daerah dengan memfasilitasi pengelolaan jalan daerah yang lebih efektif sebagai satu dari lima tujuan utama yang tertulis dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019.

Guna menunjang pelaksanaan Program/Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tersebut agar berdaya guna dan sesuai dengan yang telah direncanakan, baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan yang mememenuhi spesifikasi ataupun ketentuan/persyaratan yang berlaku, maka perlu disusun laporan kegiatan dalam bentuk Laporan Tahunan. Laporan ini secara umum merupakan gambaran perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

## 2.3. Tugas dan Fungsi

### 2.3.1. Kepala UPTD Jalan dan Jembatan

Kepala UPTD Jalan dan Jembatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Jalan dan Jembatan.

### 2.3.2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, tugas umum lainnya lingkup UPTD Jalan dan Jembatan.
Uraian tugas Sub Tata Usaha meliputi :

a. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
b. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian;
c. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan;
d. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi barang inventaris/asset;
e. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 2.3.3. Seksi Jalan dan Jembatan

Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan, serta pengamanan bagian-bagian jalan dan jembatan dengan ruas penanganan jalan dan jembatan.
Uraian tugas Seksi Jalan dan Jembatan meliputi :

a. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;
b. Menyelenggarakan penyusunan kjerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan;
c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;
d. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan Kabupaten/Kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;
e. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan/pemantauan harian kondisi jalan dan jembatan serta membuat laporan harian kondisi jalan dan jembatan;
f. Menyelenggarakan pembuatan desain teknis sederhana (simplified sesign) untuk pengamanan bagian badan jalan dan/atau daerah milik jalan;
g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada bagian jalan dan daerah milik jalan;
h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan pemulihan kondisi jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 2.3.4. Wilayah Kerja

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V, wilayah kerja Seksi Jalan dan Jembatan I meliputi (Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kota Sawahlunto) dan untuk Seksi Jalan dan Jembatan II (Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya).

### 2.3.5. Tata Kerja

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil Langkah-langkah yang diperlukan.
- Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunuuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## 2.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

### 2.4.1. Rekapitulasi PNS

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V sebanyak 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemetaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada tabel.

**Tabel 2.1 Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| Tingkat pendidikan | Jumlah Pegawai | | Total |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| S2 | 0 | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S1 | 4 | 0 | 4 |
| D-III | 1 | 2 | 3 |
| SMA | 4 | 0 | 4 |
| SMP | 0 | 0 | 0 |
| SD | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 9 | 3 | 12 |

**Tabel 2.2 Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Seksi V.1**

| Tingkat pendidikan | Jumlah Pegawai | | Total |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| S2 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | 1 | 0 | 1 |
| D-III | 1 | 1 | 2 |
| SMA | 1 | 0 | 1 |
| SMP | 0 | 0 | 0 |
| SD | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 1 | 4 |

**Tabel 2.3 Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Seksi V.2**

| Tingkat pendidikan | Jumlah Pegawai | | Total |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| S2 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | 1 | 1 | 2 |
| D-III | 0 | 0 | 0 |
| SMA | 1 | 0 | 1 |
| SMP | 0 | 0 | 0 |
| SD | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 1 | 3 |

### 2.4.2. Rekapitulasi Non PNS

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V sebanyak 4 orang Non - Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS). Pemetaan Non - Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada tabel.

**Tabel 2.4 Rekapitulasi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wil. VI Non PNS**

| Jabatan | Jumlah Pegawai Non-PNS | | Total |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| Sopir | 1 | 0 | 1 |
| Tenaga Kebersihan | 1 | 0 | 1 |
| Tenaga Keamanan | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 4 | 0 | 4 |

## 2.5. Peralatan

Peralatan yang menunjang kegiatan operasional dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu peralatan penunjang kegiatan di kantor dan di lapangan.

### 2.5.1. Peralatan Kantor

Sarana pengolahan data yang diadakan meliputi komputer dan perlengkapannya dengan tujuan utama menunjang operasional kegiatan kantor.

**Tabel 2.5 Peralatan Penunjang Kegiatan di Kantor**

| No | Nama Unit/Barang | Merk | Kondisi | | | Jumlah | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | | |
| 1 | All in One PC | Asus, | 1 | - | - | 1 | Unit |
| | | Lenovo, | 1 | - | - | 1 | Unit |
| | | Compac | 2 | - | - | 2 | Unit |
| 2 | Printer | Brother, | 1 | - | - | 1 | Unit |
| | | Epson, | 1 | - | - | 1 | Unit |
| | | Canon, | 1 | - | - | 1 | Unit |
| 3 | Meja Rapat | - | 1 | - | - | 1 | Unit |
| 4 | Meja Kerja | - | 14 | 2 | - | 16 | Unit |

### 2.5.2. Peralatan Lapangan

Sarana pendukung untuk operasional pekerjaan di lapangan sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Peralatan Penunjang Kegiatan di Lapangan**

| No | Nama Unit/Barang | Merk | Kondisi | | | Jumlah | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | | |
| 1 | Mesin potong rumput | Tanika, | √ | - | - | 2 | Unit |
| | | Tanaka | √ | - | - | 6 | Unit |
| 2 | Kendaraan Dinas Roda 4 | Mitsubishi, | √ | - | - | 1 | Unit |
| | | Panther | √ | - | - | 2 | Unit |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dump Truck | Isuzu | √ | - | - | 1 | Unit |
| 4 | Truck Crane | Isuzu | √ | - | - | 1 | Unit |
| 5 | Baby Roller | Sakai | √ | - | - | 1 | Unit |
| 6 | Compressor + Braker | AHas copco | √ | - | - | 1 | Unit |
| 7 | Backhoe Loader | Case | √ | - | - | 1 | Unit |

# BAB III
# KINERJA

## 3.1 Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Paket Pekerjaan

### 3.1.1. Pelaksanaan Program

Program yang ditargetkan oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yaitu :

a. Program 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan

### 3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan

Adapun pelaksanaan kegiatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan bagian dari Pelaksanaan Program yang dijabarkan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi (1.03.10.1.01).
   Pada kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2023 memfokuskan pada pelaksanaan Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan. Kegiatan tersebut meliputi :
   - Pekerjaan Konstruksi, diantaranya :
     1) Pemeliharaan Rutin Jalan
     2) Pemeliharaan Rutin Jembatan

### 3.1.3. Pelaksanaan Kegiatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari pelaksanaan program yang dijabarkan sebagai berikut :

a) Kegiatan 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Pada Kegiatan 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 masih berfokus kepada kebutuhan logistik operasional kegiatan pegawai di kantor termasuk acara rapat koordinasi dengan SKPD.
   - Sub Kegiatan 1.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilakukan secara swakelola dengan masa pelaksanaan 360 hari kalender.
     - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
     - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
     - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan
     - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
     - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

- 1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan secara swakelola dengan masa pelaksanaan 360 hari kalender.
  - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
  - Belanja Makanan dan Minuman Rapat
  - Belanja Perjalanan Dinas

### 3.1.4. Pelaksanaan Sub Kegiatan

Ruang lingkup penanganan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan yang ditangani dengan Pekerjaan Swakelola UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V pada tahun 2023 adalah dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin Jalan**

| No | Nama Ruas | No Ruas | STA. | Panjang Ruas (KM) | Panjang Penanganan (KM) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tj. Ampalu - Sijunjung | P. 008 | 107+000 – 127+000 | 19,8 | 20,00 | |
| 2. | Guguk Cino - Sitangkai | P. 039 | 116+600 - 131+300 | 14,5 | 14,70 | |
| 3. | Sitangkai – Tj. Ampalu | P. 040 | 131+300 – 148+800 | 17,46 | 17,28 | |
| 4. | Sp. Napar-Bukit Bual-Tj. Ampalu | P. 191 | 134+050 – 148+600 | 14,69 | 8,00 | |
| 5. | Rawang - Talawi | P. 102 | 135+000 – 147+500 | 12,90 | 12,00 | |
| 6. | Simancung – Tj. Ampalu | P. 007 | 096+000 – 107+000 | 10,62 | 11,68 | |
| 7. | Sijunjung – Tn. Badantung | P. 055 | 127+000 - 131+400 | 4,14 | 4,40 | |
| 8. | Sp. Sikabau – Sp. Koto Baru | P. 010 | 193+000 - 222+000 | 29,48 | 29,00 | |
| 9. | Sp. Koto Baru – Tj. Simalidu | P. 011 | 222+000 - 233+900 | 12,10 | 11,90 | |
| 10. | Sp. Koto Baru - Junction | P. 012 | 222+000 - 227+400 | 5,17 | 5,40 | |
| 11. | Junction – Abai Siat | P. 055 | 227+400 – 240+000 | 12,38 | 12,60 | |
| **Total** | | | | **183,36** | **143,36** | |

## 3.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah

### 3.2.1. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di lingkup UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Binas Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, diantaranya :

1. Koordinasi dengan instansi terkait seperti PDAM dan PLN yang kurang terjalin baik.
2. Adanya Truk Besar (Overload) Pengangkut hasil kebun sawit dan pengangkut material batu pecah di Ruas Sp. Sikabau – Sp. Koto Baru sehingga terjadinya kerusakan jalan.
3. Cuaca Ekstrim dan Cenderung Hujan yang mengakibatkan banyak terjadi longsoran sehingga sering terjadinya longsoran dibeberapa titik.
4. Prilaku masyarakat ; tidak adanya saluran buang sehingga menyebabkan air tergenang di badan jalan
5. Kondisi lokasi kerja yang berbukit sehingga menyulitkan dalam pekerjaan galian, sehingga galian dikerjakan dengan manual saja.

### 3.2.2. Upaya Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, upaya pemecahan permasalahan yang dilakukan adalah :

1. Menjalin koordinasi kembali dengan instansi yang terkait atau yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ada di lapangan.
2. Pembersihan Longsoran dan Memasang rambu peringatan, Police line dan Menyusun Karung berisi pasir untuk menahan luncuran air kelereng bawah pada titik terban.
3. Sosialisasi dan pendekatan ke perangkat desa/nagari serta ke Masyarakat
4. Pembersihan Saluran Untuk Antisipasi tidak adanya genangan air.
5. Penambahan Tim Pekerja untuk pekerjaan galian.

## 3.3. Realisasi Fisik dan Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023 dan DPA Pergeseran Nomor : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 17 April 2023 dan pada DPA Perubahan Nomor : DPPA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 20 November 2023, pagu UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebanyak Rp. 5.496.984.552,-.

Realisasi Keuangan dari UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp.

5.494.155.636,- atau mencapai 99,95%. dengan progres fisik sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 99,95%.

### 3.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada DPA Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 15.000.000 dan DPA Pergeseran Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 15.000.000, Sedangkan pada DPA Perubahan Tahun 2023, pagu Sub Bagian ini menjadi Rp. 12.937.500. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut.

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran | : Rp. 12.937.500 |
| Realisasi Anggaran | : Rp. 12.920.100 |
| Sisa Anggaran | : Rp. 17.400 |
| Persentase Realisasi Keuangan | : Rp. 99,87 % |
| Persentase Realisasi Fisik | : Rp. 100 % |

### 3.3.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada DPA Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 84.461.928 dan DPA Pergeseran Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 84.461.928, Sedangkan pada DPA Perubahan Tahun 2023, pagu Sub Bagian ini menjadi Rp. 84.461.928. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran | : Rp. 84.461.928 |
| Realisasi Anggaran | : Rp. 84.177.550 |
| Sisa Anggaran | : Rp. 284.378 |
| Persentase Realisasi Keuangan | : Rp. 99.66 % |
| Persentase Realisasi Fisik | : Rp. 100 % |

### 3.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada DPA Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 25.000.000 dan DPA Pergeseran Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 25.000.000, Sedangkan pada DPA Perubahan Tahun 2023, pagu Sub Bagian ini menjadi Rp. 19.400.000. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Jumlah Anggaran | : Rp. 19.400.000 |

Realisasi Anggaran : Rp. 17.644.908
Sisa Anggaran : Rp. 1.755.092
Persentase Realisasi Keuangan : Rp. 90.95 %
Persentase Realisasi Fisik : Rp. 100 %

### 3.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada DPA Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 130.538.072 dan DPA Pergeseran Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 130.538.072, Sedangkan pada DPA Perubahan Tahun 2023, pagu Sub Bagian ini menjadi Rp. 141.575.048. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Jumlah Anggaran : Rp. 141.575.048
Realisasi Anggaran : Rp. 141.575.048
Sisa Anggaran : Rp. -,
Persentase Realisasi Keuangan : Rp. 100 %
Persentase Realisasi Fisik : Rp. 100 %

### 3.3.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Untuk Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada DPA Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 4.970.860.000 dan DPA Pergeseran Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 4.970.860.000, Sedangkan pada DPA Perubahan Tahun 2023, pagu Sub Bagian ini menjadi Rp. 4.967.485.524. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Jumlah Anggaran : Rp. 4.883.885.827
Realisasi Anggaran : Rp. 4.883.227.478
Sisa Anggaran : Rp. 658.349
Persentase Realisasi Keuangan : Rp. 99.99 %
Persentase Realisasi Fisik : Rp. 100 %

### 3.3.6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Untuk Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan pada DPA Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 172.100.000 dan DPA Pergeseran Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 172.100.000, Sedangkan pada DPA Perubahan Tahun 2023, pagu Sub Bagian ini menjadi Rp. 83.599.697. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Jumlah Anggaran : Rp. 83.599.697
Realisasi Anggaran : Rp. 82.626.000
Sisa Anggaran : Rp. 973.697

Persentase Realisasi Keuangan : 98,84 %

Persentase Realisasi Fisik : 100 %

### 3.4. Capaian Kinerja

Kinerja merupakan catatan hasil (output) yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan atau kegiatan selama suatu periode tertentu. Pada tahun 2023, UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja**

| No. | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Keuangan | | Fisik |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rp | % | % |
| 1. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12.937.500 | 12.920.100 | 99,87 | 100,00 |
| 2. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 84.461.928 | 84.177.550 | 99.66 | 100,00 |
| 3. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.937.500 | 12.920.100 | 99,87 | 100,00 |
| 4. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 141.575.048 | 141.575.048 | 100 | 100,00 |
| 6. | Pemeliharaan Rutin Jalan | 4.883.885.827 | 4.883.227.478 | 99,99 | 100,00 |
| 7. | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 83.599.697 | 82.626.000 | 98,84 | 100,00 |

### 3.5. Pelaksanaan Kegiatan

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI, Selain Kegiatan Rutin sebagai pengelola data dan Informasi mempunyai 10 Ruas Jalan yang ditangani secara swakelola dan 1 Ruas Jalan ditangani secara berkala melalui system e-catalog. Laporan pelaksanaan kegiatan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran dan ringkasan kegiatan sebagai berikut.

**Tabel 3.3 Pelaksanaan Kegiatan**

| No. | Uraian | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi | | Fisik | Sisa Anggaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan | % | % | Rp. | % |
| 1. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12.937.500 | 12.920.100 | 99,87 | 100 | 17.400 | 0,13 |
| 2. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 84.461.928 | 84.177.550 | 99.66 | 100 | 284.378 | 0,34 |
| 3. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.937.500 | 12.920.100 | 99,87 | 100 | 1.755.092 | 13,56 |
| 4. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 141.575.048 | 141.575.048 | 100 | 100 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Pemeliharaan Rutin Jalan | 4.883.885.827 | 4.883.227.478 | 99,99 | 100 | 658.349 | 0,01 |
| 7. | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 83.599.697 | 82.626.000 | 98,84 | 100 | 973.697 | 1,18 |

### 3.6. Paket yang Melewati Tahun Anggaran 2023 dan Paket putus kontrak

#### 3.6.1. Paket yang Melewati Tahun Anggaran 2023

**Daftar Paket yang Melewati Tahun Anggaran**

| No. | Nama Paket | Nama Perusahaan Penyedia | Nilai Kontrak | Realisasi Terakhir (%) | | Status (Tanggal PHO) | Nilai yang Dibayarkan APBD-P 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Keuangan | Fisik | | |
| NIHIL | | | | | | | |

#### 3.6.2. Paket Paket putus kontrak

**Daftar Keterangan / Penyebab Paket yang Melewati Tahun Anggaran / Paket yang Tidak Selesai Tahun 2023**

| No. | Nama Paket | Status (Tanggal PHO) | Keterangan / Penyebab |
|---|---|---|---|
| NIHIL | | | |

**Daftar Paket Putus Kontrak Tahun Anggaran 2023**

| No. | Nama Paket | Nama Perusahaan Penyedia | Nilai Kontrak | Realisasi Terakhir (%) | | Status (Tanggal PHO) | Nilai yang Dibayarkan APBD-P 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Keuangan | Fisik | | |
| NIHIL | | | | | | | |

**Daftar Keterangan / Penyebab Putus Kontrak Tahun Anggaran 2023**

| No. | Nama Paket | Status (Tanggal PHO) | Keterangan / Penyebab |
|---|---|---|---|
| NIHIL | | | |

### 3.7. Penghargaan

Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah/Lembaga terkait kepada kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah lainnya. Pada tahun 2023, UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V pada tahun ini belum mendapatkan penghargaan apapun, namun untuk ke depan nya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V berkomitmen meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

# BAB VI
# PENUTUP

Laporan Tahunan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Berdasarkan capaian keuangan diketahui bahwa kinerja UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas BMCKTR berada pada prediket penilaian “sangat baik”, sementara dari capaian realisasi fisik berada pada predikat “sangat baik”. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka mewujudkan capaian keuangan lebih baik di masa mendatang antara lain :

1. Menempatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing sehingga kinerja pelaksanaan kegiatan memberikan hasil yang baik.
2. Meningkatkan monitoring dan pengawasan berlapis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
3. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan seperti PDAM dan PLN.

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak dalam melaksanakan pelayanan yang baik dari UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat bagi stakedholder terkait. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap pihak terkait dan masyarakat.

# LAMPIRAN

| Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai | Persentase |
|---|---|---|
| Laki-laki | 11 orang | 79 % |
| Perempuan | 3 orang | 21 % |

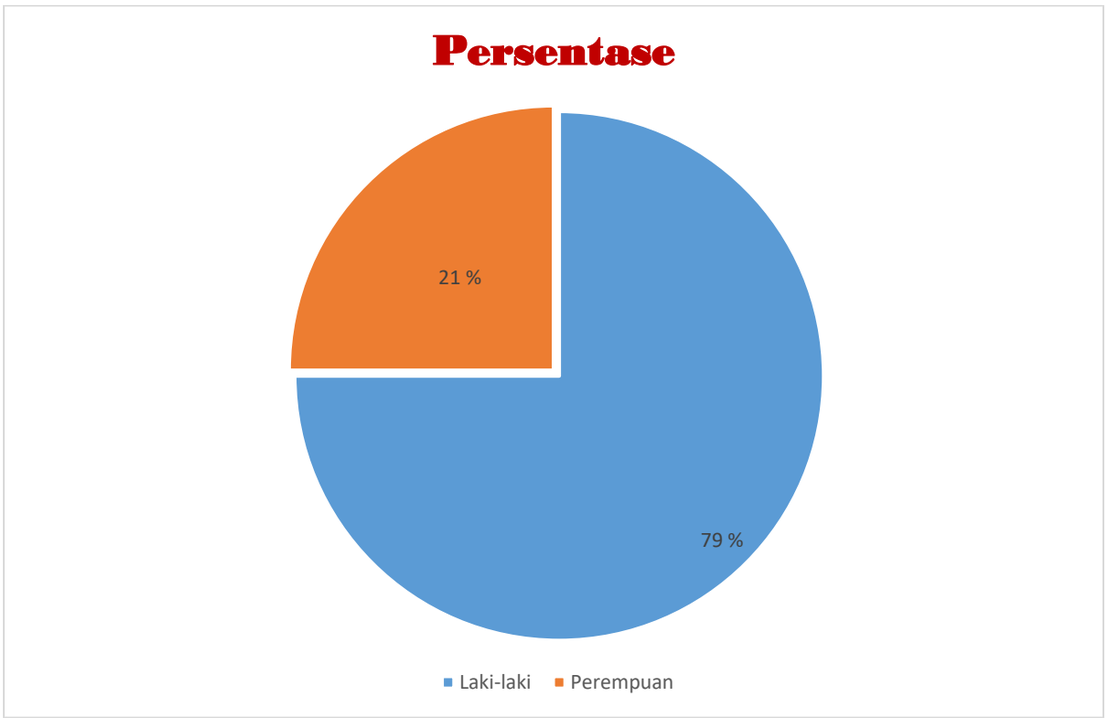


**Gambar 1. Grafik Komposisi Pegawai UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Tahun 2023**

**LOKASI KEGIATAN**
**UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KETERANGAN :

| NO. | RUAS JALAN | LINK | KM | | | PANJANG | PANJANG PENANGANAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guguk Cino - Sawahlunto | P. 038 | 116+600 | s/d | 147+000 | 30,60 KM | 30,60 KM |
| 2. | Rawang - Talawi | P. 102 | 125+800 | s/d | 129+800 | 6,00 KM | 6,00 KM |
| 3. | Guguk Cino - Sitangkai | P. 039 | 116+600 | s/d | 131+520 | 15,12 KM | 15,12 KM |
| 4. | Sitangkai - Tj. Ampalu | P. 040 | 131+520 | s/d | 148+800 | 17,28 KM | 17,28 KM |
| 5. | Sp. Napar - Bukit Bual - Tj. Ampalu | P. 091 | 141+700 | s/d | 148+700 | 7,00 KM | 5,00 KM |
| 6. | Tj. Ampalu - Sijunjung | P. 008 | 107+000 | s/d | 127+000 | 20,00 KM | 20,00 KM |
| 7. | Sirancung - Tj. Ampalu | P. 007 | 96+600 | s/d | 107+000 | 11,08 KM | 11,08 KM |
| 8. | Sijunjung - Tn. Bedentung | P. 055 | 127+000 | s/d | 131+400 | 4,40 KM | 4,40 KM |
| 9. | Sirabau - Sp. Koto Baru | P. 010 | 193+000 | s/d | 222+000 | 29,00 KM | 29,00 KM |
| 10. | Sp. Koto Baru - Tj. Simalidu | P. 011 | 222+000 | s/d | 233+900 | 11,90 KM | 11,90 KM |
| 11. | Sp. Koto Baru - Juction | P. 012 | 222+000 | s/d | 227+400 | 5,40 KM | 5,40 KM |
| 12. | Juction - Abai Siat - BatasJambi | P. 054 | 227+400 | s/d | 240+000 | 12,60 KM | 12,60 KM |
| | | | | | | | |
| | Panjang Penanganan | | | | | 170,38 KM | 168,38 KM |

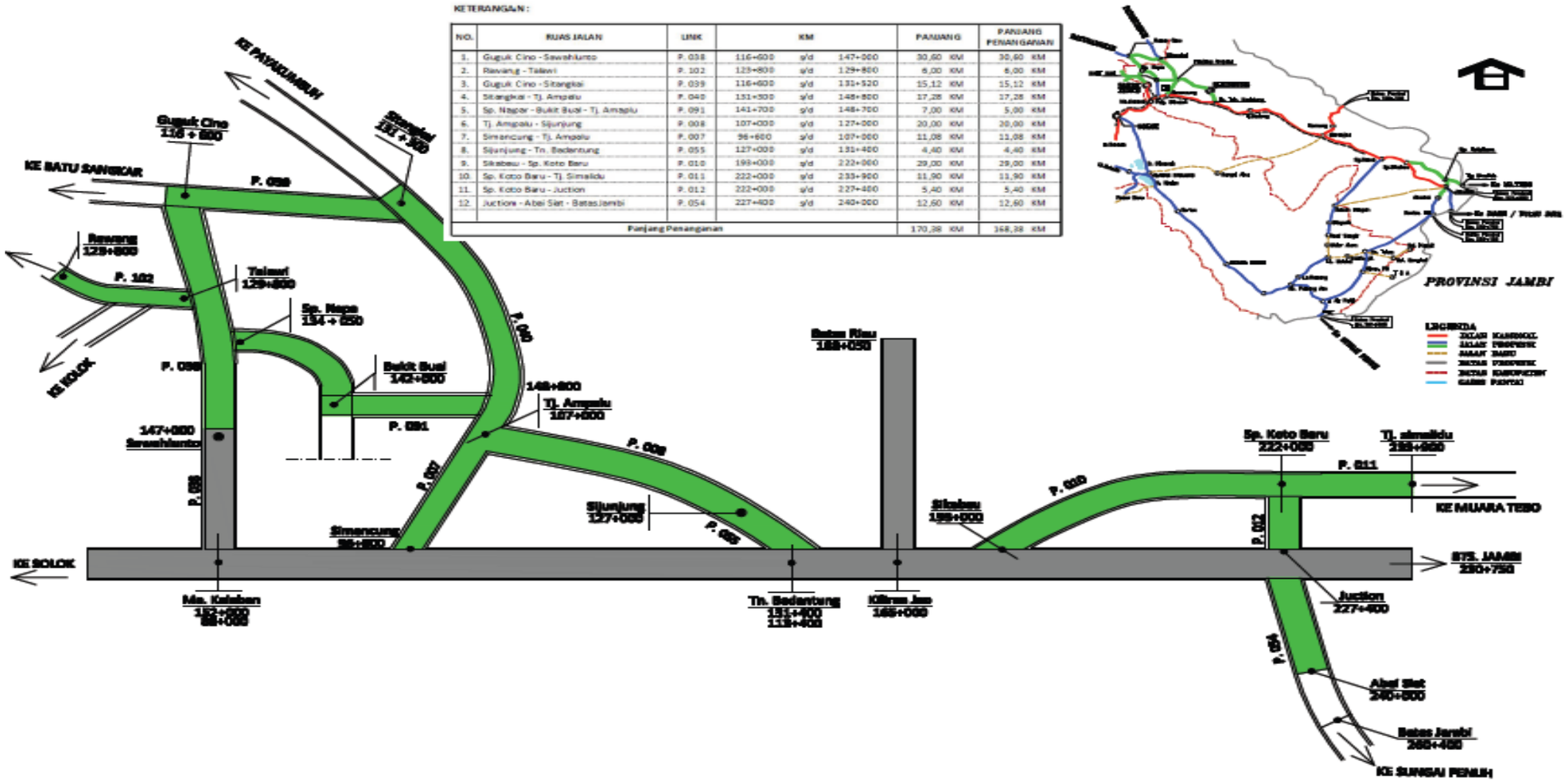


**Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI**

# GAMBAR

# FOTO DOKUMENTASI

## Ruas Jalan Tj. Ampalu – Sijunjung (P. 008)

Pekerjaan Pemetakan Patching, Km. 115+500

0 %

50 %

100 %

Pekerjaan Levelling Aspal Hotmix, Km. 117+850

0 %

50 %

100 %

# FOTO DOKUMENTASI

## Ruas Jalan Guguk Cino – Sitangkai (P. 039)

Pekerjaan Pemotongan Bahu Jalan Sta 126+500

0 %

50 %

100 %

## Ruas Jalan Sitangkai – Tj. Ampalu (P. 040)

Pekerjaan Pasangan Batu Mortar Sta 136+050

0 %

50 %

100 %

# FOTO DOKUMENTASI

## Ruas Jalan Rawang – Talawi P. 102

## Ruas Jalan Sitangkai – Tj. Ampalu (P. 040)

# FOTO DOKUMENTASI

## Ruas Jalan Sp. Napar – Bukit Bual – Tj. Ampalu (P. 091)

0 %

50 %

100 %

## Ruas Jalan Sitangkai – Tj.

0 %

50 %

100 %

# FOTO DOKUMENTASI

## Ruas Jalan Rawang – Talawi (P. 102)

0 %

50 %

100 %

0 %

50 %

100 %

# FOTO DOKUMENTASI

## Ruas Jalan Tj. Ampalu – Sijunjung (P. 008)

**Pekerjaan Patching dengan Hotmix Km. 115+500**

0 %

50 %

100 %

**Pekerjaan Tack Coat**

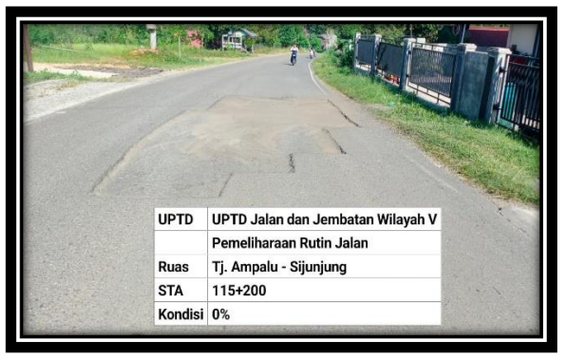


0 %

50 %

100 %